

PENGUATAN BUMDES MERDEKA WIROWONGSO MENUJU PEREKONOMIAN DESA YANG LEBIH SEJAHTERA

Nita Elvita, Adelia Eka Puspita Ansori, Myra Andina Ramadhani, Ririn Isnadewi, Dessy Putri Andini, Arisona Ahmad

Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember
*Email: nitaelvital@gmail.com

Naskah diterima: 26-05-2025, disetujui: 30-05-2025, diterbitkan: 31-05-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v8i2.9161>

Abstrak - BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pendirian dan pengelolaan BUMDes sering menghadapi berbagai kendala. Artikel ini disusun berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di BUMDes Merdeka Wirowongso, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kegiatan bertema “Penguatan BUMDes Merdeka Wirowongso Menuju Perekonomian Desa yang Lebih Sejahtera” ini dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi bersama para pengelola BUMDes. Dari kegiatan tersebut, tim pengabdian berhasil mengidentifikasi beberapa masalah utama, baik dalam tahap pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. Sebagai solusi, beberapa langkah yang disarankan mencakup peningkatan sosialisasi, pelibatan masyarakat secara aktif, perencanaan yang lebih matang, dan pendampingan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mendukung pengelolaan BUMDes yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bumdes, Pengelolaan Bumdes, Pemberdayaan Desa.

LATAR BELAKANG

Pedoman pemerintah Desa sebagai panduan dalam hal regulasi merujuk pada diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengelolaan, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Isu yang sangat krusial saat ini dan kedepannya adalah perlunya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketahanan Pangan yang ada di Desa, mengingat ada perbedaan signifikan antara masyarakat daerah perkotaan dengan masyarakat di pedesaan. Karena itu, pihak yang terlibat dalam Program Membangun Desa harus memperhatikan atau melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada warga terkait pengembangan SDM dan Ketahanan Pangan. Masalah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum bagi kepala desa, pelaku ekonomi, atau BUMDes,

terutama mengingat dana Desa sudah mulai berjalan sejak tahun 2015 hingga 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prospek yang dapat diandalkan berdasarkan potensi yang dimiliki desa dalam mengembangkan ekonomi pedesaan melalui lembaga pemberdayaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola secara profesional. Potensi alam yang ada, seperti pertanian, pariwisata, perkebunan, persewaan, kelautan, perdagangan, dan bisnis mikro, dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan mandiri oleh desa. Setiap desa dapat memiliki satu produk unggulan, sesuai dengan instruksi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia.

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang

berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

Keuntungan positif lainnya dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), dukungan untuk masyarakat miskin, serta pembangunan pemanfaatan aset desa. Secara tidak langsung, hadirnya BUMDes dan hasilnya menjadi model pemberdayaan ekonomi sekaligus solusi bagi perkembangan ekonomi di desa.

Peningkatan kapasitas serta penyediaan sarana bagi para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh dipandang sebelah mata. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Wardana et al., 2021). Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015).

Keberhasilan dan pertumbuhan BUMDes sangat bergantung pada dukungan dari berbagai aspek, baik itu sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan, maupun infrastruktur. Dengan dukungan yang menyeluruh, para pengelola BUMDes akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Isu mengenai model pemberdayaan ekonomi desa menjadi sangat relevan untuk dibahas secara mendalam. Mengingat kondisi sosial, budaya, sumber daya, serta potensi

ekonomi tiap desa yang berbeda-beda, maka pendekatan pemberdayaan pun tidak bisa bersifat seragam. Diperlukan model pemberdayaan ekonomi yang fleksibel, yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik lokal, baik melalui pendekatan modern berbasis teknologi dan inovasi, maupun pendekatan tradisional yang mengakar pada kearifan lokal. Keduanya memiliki peran penting dan dapat berjalan secara sinergis apabila dikelola dengan profesionalisme tinggi serta pendampingan yang berkelanjutan dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga simbol kemandirian dan kekuatan masyarakat lokal dalam membangun masa depan yang lebih sejahtera.



Gambar 1. Logo BUMDes Wirowongso

BUMDES Merdeka Wirowongso merupakan Badan Usaha Milik Desa yang telah berbadan hukum dan berdiri sejak tahun 2023 nomor registrasi AHU-04957.AH.01.33. Tahun 2023 dengan unit usaha sektor jasa Gantangan Burung, adanya unit usaha Gantangan Burung ini merupakan dampak dari kosongnya lahan di depan kantor Desa Wirowongso. Kemudian guna memberikan daya dukung serta mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri pemerintah desa setempat memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan usaha yaitu Gantangan Burung. Selain

bermanfaat dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) tujuan dari pendirian BUMDes Merdeka Wirowongso adalah mewujudkan sistem perekonomian masyarakat pedesaan yang mandiri sehingga akan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, menggali potensi desa serta meningkatkan perekonomian desa dengan membangun pariwisata dan produktivitas usaha di desa, mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dan sekitarnya dalam meningkatkan kapasitas kontribusi masyarakat dalam unit usaha, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa terkhusus remaja desa bagi mereka yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan karena faktor Pendidikan serta meningkatkan pendapatan asli desa. Selama ini pembangunan negara dilakukan secara *top down* yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Lahirnya Undang-Undang Desa harus mengubah pendekatan pembangunan dari *top down* ke *bottom up*. Sudah saatnya pembangunan dimulai dari desa sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara adil dan merata (Muhtada et al., 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini berawal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis bersama Tim Pengabdian dari program studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember pada tahun 2025 di desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai bentuk kontribusi akademis dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rangkaian kegiatan pengabdian ini terdiri atas perjanjian MOU dengan Kepala Desa Wirowongso, pelaksanaan diskusi dan monitoring yang bertujuan untuk memberikan

pendampingan sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes. Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal, antara lain Kepala Desa, Direktur BUMDes Merdeka Wirowongso, Bendahara desa dan perwakilan masyarakat setempat.



Gambar 2. MOU dengan Kepala Desa Wirowongso

Secara garis besar, kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh Tim Pengabdian Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember yang berfokus pada strategi penguatan kelembagaan dan tata kelola BUMDes. Penyampaian materi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan praktik-praktik terbaik yang relevan dengan konteks lokal. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi yang dimoderatori oleh Tim Pengabdian. Diskusi tersebut berfungsi sebagai wadah interaktif bagi para pegawai BUMDes dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam proses pendirian, pengelolaan, maupun pengembangan BUMDes di desanya masing-masing. Isu-isu yang diangkat mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia, hingga persoalan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha.

Melalui diskusi yang partisipatif dan kolaboratif, para peserta bersama tim fasilitator berupaya merumuskan berbagai alternatif solusi yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

sosial-ekonomi setempat. Hasil dari proses diskusi ini kemudian didokumentasikan dan menjadi dasar utama dalam penyusunan artikel ini. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap dinamika lapangan serta berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan BUMDes secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Endah (2019) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu inovasi strategis dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian desa yang berlandaskan pada kebutuhan nyata serta potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Sebagai bentuk badan usaha yang berakar kuat di desa, pengelolaan BUMDes dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa sendiri dengan semboyan yang melekat dari desa, oleh desa, dan untuk kepentingan desa.

Dalam operasionalnya, BUMDes berperan sebagai wadah kelembagaan yang menghimpun berbagai aktivitas ekonomi masyarakat desa dalam satu sistem yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Meskipun menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, BUMDes tetap berpegang pada kekuatan lokal dan kearifan tradisional yang menjadi ciri khas desa masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan unit usaha yang lebih produktif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi desa.

Kedepannya, BUMDes diharapkan tumbuh sebagai pilar utama kemandirian ekonomi nasional yang dimulai dari level

paling bawah, yaitu desa. Lebih dari sekadar entitas usaha, BUMDes juga diposisikan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang menyesuaikan dengan karakter dan potensi lokal. Dengan demikian, kehadiran BUMDes bukan hanya akan memperkuat struktur ekonomi pedesaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa Wirowongso merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ajung, kabupaten Jember. Suku Madura dan Jawa mendominasi Desa Wirowongso. Pengembangan BUMDes Merdeka Wirowongso dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa agar mampu secara optimal mengelola aset-aset ekonomi lokal. Peningkatan kapasitas ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pendampingan agar SDM desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan potensi ekonomi desa secara profesional dan berkelanjutan. Kemudian mendorong terbentuknya skala ekonomi yang kompetitif melalui pengembangan unit-unit usaha desa yang berorientasi pada produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan usaha ekonomi desa mampu bersaing secara sehat di pasar terbuka, baik dengan pelaku ekonomi luar maupun antar desa itu sendiri. Selain itu guna memperkuat struktur kelembagaan ekonomi desa agar memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Kelembagaan yang kuat menjadi pondasi penting bagi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat serta mengembangkan elemen-elemen pendukung sistem ekonomi desa, seperti penyediaan layanan perkreditan

mikro untuk permodalan, akses terhadap informasi pasar, pemanfaatan teknologi tepat guna, sistem manajemen usaha yang profesional, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta perluasan jaringan komunikasi dan dukungan pembinaan dari pihak terkait. Semua unsur ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan tangguh.

BUMDes Merdeka Wirowongso, sebagai BUMDes resmi Desa Wirowongso, telah menyelenggarakan sejumlah bidang usaha yang saat ini sudah berjalan, serta merencanakan pengembangan unit-unit usaha baru yang akan dikembangkan ke depan. Seperti tabel dibawah ini

Tabel 1. Jenis bidang usaha yang sedang berjalan dan dalam perencanaan

Nama Unit Usaha	Produk/Kegiatan yang Dilaksanakan	Status
Gantangan Burung	Persewaan Gantangan Burung	sedang berjalan
Kolam Pancing Wirowongso	Persewaan kolam pancing	sedang berjalan
Persewaan mainan anak	Persewaan mainan anak odong odong	sedang berjalan
Sablon Merdeka Wirowongso	Sablon Kaos	dalam perencanaan
Mineral Merdeka Wirowongso	Produksi air minum kemasan	dalam perencanaan

Bidang-bidang usaha ini disesuaikan dengan potensi lokal desa, kebutuhan masyarakat, dan tren pasar yang terus berkembang. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

Dengan ini, BUMDes tidak hanya menjadi institusi ekonomi, tetapi juga katalisator transformasi sosial dan ekonomi di tingkat desa. Melalui penguatan kapasitas, sosialisasi yang efektif, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan, BUMDes Merdeka Wirowongso diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wirowongso secara menyeluruh.

Pemerintah terus mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat sumber daya lokal. BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif yang menerima arahan dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi sebagai entitas yang aktif dalam pembangunan desa dengan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Desa Wirowongso adalah contoh nyata dari bagaimana BUMDes bisa berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Sejak tahun 2023, Desa Wirowongso telah membentuk BUMDes dengan tujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di desa. Awalnya, unit usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah unit Gantangan burung, yang menjadi salah satu tempat berkumpul masyarakat. Dengan rutinitas *event* yang diadakan tiga kali dalam seminggu, pada hari senin dan kamis sore, serta Minggu pagi.



Gambar 3. *Event Gantangan Burung*

Unit usaha ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi kegiatan yang banyak diminati. Kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, baik untuk pendapatan desa maupun untuk warga yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, kabupaten Jember, terus digalakkan melalui pengembangan BUMDes. Pembangunan BUMDes tidak hanya menjadi sarana untuk mengelola potensi dan aset strategis desa, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memperluas jejaring ekonomi lokal. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan agar BUMDes mampu meningkatkan daya saing ekonomi desa secara optimal. Salah satu strategi penting yang ditempuh adalah melalui pelatihan intensif yang mencakup tiga aspek utama: penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Pelatihan ini bertujuan agar pengelola BUMDes memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan tata kelola yang baik dalam mengelola usaha secara profesional dan berorientasi pada pertumbuhan dan jejaring pasar yang lebih luas. Pendirian dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan sama-sama memiliki peran krusial dalam mewujudkan keberhasilan kelembagaan ekonomi desa. Tanpa proses pendirian yang legal dan terstruktur, keberadaan BUMDes tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat. Begitu pula, tanpa sistem pengelolaan yang baik, BUMDes tidak akan mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses pendirian BUMDes tidak selalu berjalan mulus. Di lapangan, khususnya pada BUMDes Merdeka Wirowongso banyak ditemui berbagai kendala dan tantangan yang menjadi penghambat dalam upaya pembentukan BUMDes. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan cukup kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat tentang mengenai BUMDes, dan lemahnya pencatatan dan pembukuan dalam transaksi disetiap unit usaha.

Permasalahan yang paling dominan adalah terkait aspek pencatatan dan pembukuan transaksi unit usaha di BUMDes Merdeka Wirowongso masih mengalami kesulitan dalam hal ini, kurangnya sumber daya manusia juga kurangnya individu yang memiliki pemahaman memadai mengenai dunia ekonomi dan manajerial, maupun teknis dalam pendirian BUMDes menjadi kendala serius yang menghambat proses pembukuan. Padahal, pelaporan keuangan yang kompeten dan akuntabilitas sangat dibutuhkan, terutama untuk memastikan bahwa proses transaksi di

setiap unit usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan tanpa adanya kecurangan.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan, kami dari Tim Pengabdian Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember melakukan pendampingan rutin kepada BUMDes Merdeka Wirowongso terkait proses pencatatan dan pembukuan yang benar dan seharusnya, dengan menggunakan aplikasi penunjang yang memudahkan para pegawai di BUMDes Merdeka Wirowongso untuk memahami langkah langkah dalam setiap pencatatan transaksi pada aplikasi tersebut.



Gambar 4. Aplikasi Penunjang

Langkah ini penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap pencatatan dan pembukuan transaksi di unit usaha BUMDes Merdeka Wirowongso dalam mewujudkan laporan keuangan yang sistematis, akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan.

Penguatan dan pengembangan BUMDes ini sejalan dengan tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menumbuhkan kembangkan ekonomi lokal. Dengan terstrukturnya pencatatan dan pelaporan pada BUMDes Merdeka Wirowongso diharapkan membuka peluang bagi warga desa untuk mengembangkan keterampilan dan berwirausaha. Lebih dari itu, BUMDes juga memberikan contoh bagaimana potensi lokal bisa digarap secara optimal untuk mendukung kemajuan desa secara berkelanjutan.

Diharapkan desa Wirowongso dapat mewujudkan BUMDes yang maju dan bisa memberikan contoh positif bagi BUMDes lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes Merdeka Wirowongso memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Desa Wirowongso. BUMDes ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemajuan desa, khususnya dalam aspek peningkatan ekonomi lokal dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Melalui pelayanan yang diberikan kepada warga dan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki desa, BUMDes turut serta dalam menciptakan perekonomian yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya pendapatan asli yang dihasilkan melalui BUMDes, desa memiliki kapasitas untuk membiayai pembangunan secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Namun, dalam implementasinya, proses pendirian dan pengelolaan BUMDes tidak terlepas dari berbagai persoalan dan hambatan yang kompleks. Berbagai tantangan ini menjadi kendala signifikan yang menghambat optimalisasi peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. BUMDes Merdeka Wirowongso memiliki salah satu persoalan yang cukup menonjol yakni terkait dengan aspek pencatatan dan pembukuan keuangan. Permasalahan ini muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang administrasi dan akuntansi. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan BUMDes menjadi tidak akurat, tidak transparan, dan rawan terhadap kesalahan maupun penyalahgunaan. Permasalahan pencatatan keuangan yang tidak tertib tentu berdampak

pada kredibilitas dan akuntabilitas BUMDes itu sendiri. Tanpa sistem pembukuan yang baik, sulit bagi BUMDes untuk melakukan evaluasi kinerja usaha secara objektif, menyusun laporan pertanggungjawaban, atau mengakses pendanaan dari pihak ketiga seperti lembaga keuangan maupun pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah solutif untuk menjawab tantangan ini secara konkret. Solusi yang bisa diterapkan antara lain melalui pelatihan teknis tentang akuntansi sederhana dan sistem pencatatan keuangan desa, penyediaan pendampingan secara berkala dari pihak-pihak yang berkompeten, seperti perguruan tinggi atau dinas terkait dan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi pembukuan yang mudah digunakan dan sesuai dengan konteks lokal dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) keuangan BUMDes sebagai pedoman kerja yang baku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan program pengabdian dari awal hingga penyusunan artikel ini selesai. Apresiasi tulus kami sampaikan kepada seluruh dosen Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Pemerintah Desa Wirowongso atas penerimaan hangat selama program ini berlangsung, bimbingan dan kerja sama yang diberikan.

Dukungan Bapak/Ibu sekalian adalah kunci utama keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah, K. (2019). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25–33.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam rangka menekan laju urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(3), 61–72.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- PKDSP, D. (2007). Buku Panduan BUMDes. *Jakarta: PP-RPDN*.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115–131.
- Wardana, F. K., Qomaruddin, M., & Soeroto, W. M. (2021). Analisis kelayakan investasi dengan pendekatan aspek financial dan strategi pemasaran pada program ayam petelur di BUM Desa Bumi Makmur. *Sebatik*, 25(2), 318–325.